

MONITORING DALAM MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

S. Nor Hasanah, S.Pd.I, M.Pd

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Pontianak

email korespondensi: sayyidahnur81@yahoo.co.id

Abstract. *Monitoring in school and security asset of education system of facilities and infra structures management based on vision and mission, therefore education institution needs to develop a management system includes planning, procurement, utilization, maintenance, deletion and updating all facilities and infrastructures. Education Institution must have special guidance about completeness and adequacy the needs of facilities and infrastructures, includes inventory classification system and information of existence. Besides that, education institution must have management system that guarantee wider access existence especially for the students and teacher through sharing resource model applied. Paradigm monitoring and evaluating toward facility and infrastructures of an education institution. so that can be described some essences of sub discussion emerging high quality and effective education, and efficient through facilities and infrastructures management, evaluating in education of facilities and infrastructures and critical analysis toward monitoring and evaluating of facilities and Infrastructures.*

Key words : *monitoring, facilities and infrastructures of education.*

Abstrak : Monitoring dalam Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan sistem pengamanan aset dan sekolah. Sesuai dengan visi dan misi maka lembaga pendidikan membutuhkan pengembangan suatu sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutakhiran semua sarana dan prasarana. Lembaga pendidikan harus memiliki panduan khusus mengenai kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem klasifikasi, inventarisasi dan informasi keberadaannya. Selain itu lembaga pendidikan harus memiliki sistem pengelolaan yang menjamin adanya akses yang lebih luas terutama bagi peserta didik dan guru melalui penerapan model-model *resource sharing*. paradigma monitoring dan evaluating terhadap sarana dan prasarana suatu lembaga pendidikan, maka dapat dipaparkan beberapa esensi sub pembahasan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas tinggi, efektif dan efisien melalui manajemen sarana dan prasarananya, antara lain: Monitoring dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan, Evaluating dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan, Telaah kritis terhadap monitoring dan evaluating sarana dan prasarana.

Kata kunci : monitoring, sarana dan prasarana pendidikan

LATAR BELAKANG MASALAH

Dapat kita dideskripsikan bahwa sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan yang mencakup bangunan, perabotan, peralatan (perangkat keras dan lunak), dan sistem pengamanan aset dan sekolah. Sesuai dengan visi dan misi maka lembaga pendidikan membutuhkan pengembangan suatu sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutakhiran semua sarana dan prasarana. Lembaga pendidikan harus memiliki panduan khusus mengenai kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem klasifikasi, inventarisasi dan informasi keberadaannya. Selain itu lembaga pendidikan harus memiliki sistem pengelolaan yang menjamin adanya akses yang lebih luas terutama bagi peserta didik dan guru melalui penerapan model-model *resource sharing*. Bentuk kepemilikan lain seperti sewa, pinjam atau hibah harus dinyatakan dalam surat kesepakatan antara lembaga pendidikan dan pihak terkait dengan kepastian hukum yang jelas.

Peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan belajar pendidikan sekolah dasar dapat dicapai apabila di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Begitupun pula kualitas lulusan sebuah sekolah tak terlepas dari kelengkapan sarana dan prasarananya. Maka tidak heran, jika sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan canggih mengeluarkan ouput yang juga berkualitas, yang tentu sangat beda sekali

dengan lembaga yang sebaliknya. Kontemporer, zaman saat ini masih banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas lengkap. Ruang belajar mengajar pun seadanya, bagaimana mau berkualitas kalau guru, buku, dan fasilitas pendukungnya minim.

Rusaknya sarana gedung sekolah menjadi problem terwujudnya mutu pendidikan. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa sebanyak 563.034 ruang kelas SD (56%) mengalami kerusakan baik berat, sedang, maupun ringan. Pemerintah berupaya melakukan intervensi perbaikan terhadap kerusakan ruang kelas tersebut melalui berbagai program antara lain: (<http://ditptksd/go.id/index.php?name=news&file=article&sid=10>)

1. Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Dana Dekonsentrasi
3. Dana Subsidi Pusat.

Dari berbagai analisis kebijakan pendidikan diuraikan bahwa penyebaran bantuan dari segala aspeknya terhadap sarana dan prasana sekolah telah dilakukan secara cermat dan terpusat oleh pemerintah, namun akses kesenjangan masih saja tetap ada antar kelompok masyarakat yang berbeda dalam hal letak geografis seperti desa dan kota, wilayah seperti provinsi dan kabupaten, status sosial-ekonomi dan mungkin juga jenis kelamin. Kesenjangan ini tampaknya tidak disebabkan oleh kebijakan (*policy*) pemerintah karena program pemerataan dan keadilan mendapat perhatian yang cukup besar, namun

hal ini disebabkan oleh akses kerumitan wilayah, pertumbuhan demografis dan keanekaragaman masyarakat itu sendiri (Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan (suatu pengantar)*, 1994 : 175). Maka perlu adanya perhatian pula dari masyarakat. Masyarakat juga harus turut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan gedung sekolah yang baik sekaligus menjaga aset yang telah dibangun pemerintah. Sebab, aset itu untuk kemajuan sumber daya manusia di daerah masing-masing, maka hendaknya tidak disia-siakan. Pemerintah membangun, masyarakat haruslah menjaganya. Maju mundurnya dunia pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Kedua komponen haruslah bekerja secara bersama-sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Melakukan monitoring dan evaluasi untuk menyakinkan apakah program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, apakah tujuan telah tercapai, dan sejauh mana pencapaiannya. Karena fokus kita adalah mutu siswa, maka kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi kebutuhan untuk mengetahui proses dan hasil belajar siswa. Secara keseluruhan tujuan dan kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk meneliti efektifitas dan efisiensi dari program sekolah dan kebijakan yang terkait dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Seringkali evaluasi tidak selalu bermanfaat dalam kasus-kasus tertentu, oleh karenanya selain hasil evaluasi juga diperlukan informasi lain yang akan dipergunakan untuk pembuatan keputusan

selanjutnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Demikian aktifitas tersebut terus menerus dilakukan sehingga merupakan suatu proses peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Sub Pokok Pembahasan

Selanjutnya, berdasarkan latar belakang permasalahan terkemuka terhadap paradigma monitoring dan evaluating terhadap sarana dan prasarana suatu lembaga pendidikan, maka dapat dipaparkan beberapa esensi sub pembahasan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas tinggi, efektif dan efisien lewat manajemen sarana dan prasarananya, antara lain:

1. Monitoring dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan
2. Evaluating dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan
3. Telaah kritis terhadap monitoring dan evaluating sarana dan prasarana

PEMBAHASAN

A. Monitoring dalam Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

1. Pengertian Monitoring Sarana dan Prasarana Sekolah

Sebelum lebih dalam fokus pada pengertian monitoring sarana dan prasarana, terlebih dahulu penulis mengajak pembaca untuk mengkaji etimologi atau ontologi dari pada monitoring dan sarana serta prasarana itu sendiri, sehingga nantinya dapat ditemukan sekaligus dipahami

sasaran makna yang relevan dalam mendeskripsikan definisi secara utuh baik secara teoritis maupun secara praktis, konsep maupun kontekstual.

Secara bahasa monitoring adalah memperingatkan atau memantau (Pius Partanto & M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 1994 : 480). Sedangkan secara epistemologi di kamus *Webster's New Collegiate Dictionary*, *monitoring* adalah: 'a device for observing 'or 'giving admonition or warning' (Anonymous, *Webster's New Collegiate Dictionary*, 1981). Yaitu sebuah alat guna mengamati atau memberikan peringatan atau teguran.

Sementara di dalam kamus *Webster's New Word Dictionary*, dikemukakan bahwa monitoring adalah; 'something that reminds or warns' or any of various devices for checking or regulating the performance, (Anonymous, *Webster's New Word Collegiate Dictionary*, 1988). Yaitu suatu yang mengingatkan atau menegur atau alat untuk memeriksa atau mengatur suatu pelaksanaan. Menurut pengertian kedua kamus internasional tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dari aktivitas yang sedang dikerjakan.

Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan analisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana, sehingga masalah yang dilihat/ditemui dapat diatasi (WHO,"

Design and Implementation of health Information System", 2000). Ia pun juga merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan berkelanjutan tentang kegiatan program/proyek sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/proyek itu selanjutnya ([http://www.biro perencanaan Departemen Sosial RI](http://www.biro.perencanaan.Departemen.Sosial.RI). (Rabu 14 November 2007).

Robert J. Mockler mendefinisikan pengawasan atau monitoring sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik (*feedback*). Membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa dalam program yang dilaksanakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan (Robert J. Mockler, *The Management Control Process*, 1972: 02).

Jadi dapat pula disimpulkan bahwa pekerjaan monitoring adalah mengumpulkan informasi untuk kebutuhan manajemen, dan untuk selanjutnya hasil pekerjaan monitoring dipakai sebagai dasar evaluasi. Dalam pelaksanaan monitoring ([www.Biro Perencanaan Departemen Sosial RI](http://www.Biro.Perencanaan.Departemen.Sosial.RI) (Rabu, 14 November 2007) biasanya terdapat pertanyaan-pertanyaan kunci tentang monitoring yang biasa terkemuka dalam operasional kerja memonitor suatu kegiatan yaitu; masalah-masalah apa yang biasa timbul?, apakah proyek berjalan sesuai jadwal?, apakah

proyek menghasilkan output yang direncanakan?, apakah anggarannya sesuai dengan rencana?, apakah strateginya berjalan sesuai dengan rencana?, dan apakah kelompok sasaran (target group) terlibat dalam aktivitas proyek?.

Kemudian pengertian dari pada sarana sendiri secara leksikal adalah alat, piranti (Pius A. Partanto & M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 1994:694) dan prasarana adalah bahan material, perangkat keras. Daryanto mengemukakan, secara etimologis sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti ruang, buku, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya. Sedangkan prasarana adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan, seperti lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olah raga, uang dan sebagainya (Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, 2001: 51).

Menurut keputusan Menteri P dan K no. 079/1975, sarana pendidikan terdiri atas 3 kelompok besar yaitu (Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, 2001 : 51) :

1. Bangunan dan perabot sekolah.
2. Alat pelajaran yang terdiri atas pembukuan dan alat-alat peraga dan laboratorium.

3. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil.

Sedangkan secara eksplisit kedua diintegrasikan sebagai manajemen sarana dan prasarana yang memiliki pengertian sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Maka selanjutnya berdasarkan pengertian terkemuka dapat kita artikan bahwa monitoring manajemen sarana dan prasarana adalah suatu proses pengumpulan dan analisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi terhadap proses kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧٦﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”(AL Zalzalah 7-8)

2. Tujuan (Urgensi) Monitoring

Kepala sekolah sebagai *top leader* mau tidak mau harus bertanggungjawab atas keseluruhan perilaku manajemen yang terjadi di sekolah. Kontrol dan koreksi merupakan tanggungjawabnya yang harus dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap kondisi-kondisi ruangan sekolah beserta perlengkapannya termasuk halaman, toilet, tempat-tempat bermain. Hal sekecil apapun harus menjadi target pengawasan dan hal ini tidak lepas dari tanggung jawab kepala sekolah beserta stafnya dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, efektif dan tentu saja harus menarik peserta didik untuk berinternalisasi di dalam sekolah tersebut.

Biro Perencanaan Departemen sosial RI merumuskan beberapa tujuan monitoring dalam suatu proyek atau pelaksanaan suatu program sebagai berikut:

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi.
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan.
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

3. Ruang Lingkup Monitoring Sarana dan Prasarana

KEPMEN (KepMen Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 *tentang pedoman pengawasan-pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana, pascasarjana di Perguruan Tinggi* (<http://www.dikti.org/>)).

Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi; Dalam rangka penjaminan akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan kegiatan pengawasan pengendalian dan pembinaan terhadap perguruan tinggi, tentang Sarana dan prasarana yang meliputi:

1. Ruang kuliah
2. Ruang dosen
3. Ruang seminar
4. Laboratorium
5. Perpustakaan
6. Fasilitas komputasi
7. Fasilitas teknologi informasi
8. Perlengkapan pendukung pembelajaran
9. Perlengkapan pendukung kegiatan kemahasiswaan
10. Peralatan laboratorium
11. Buku-buku/dokumen yang mendukung

4. Manfaat MONITORING

Manfaat dari pada *monitoring* ini, dapat kami klasifikan ke dalam 2 bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi pihak Penanggung Jawab Program:

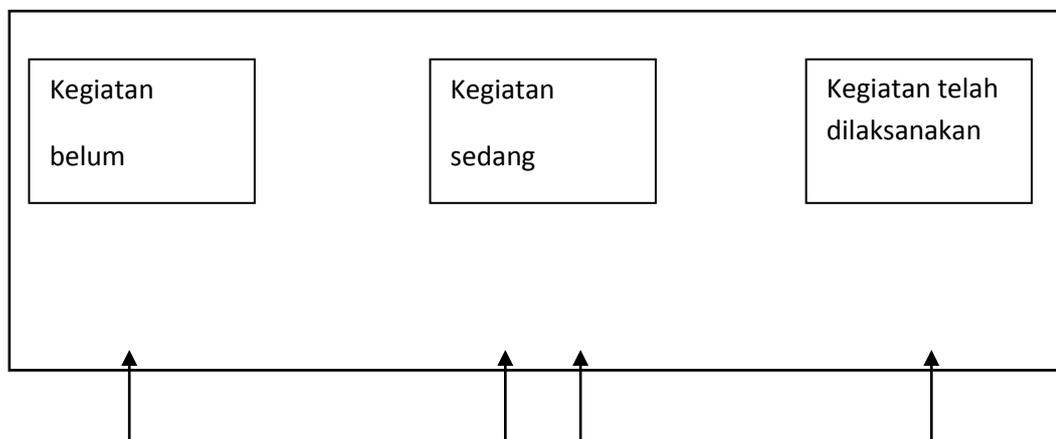
- 1). Salah satu fungsi manajemen yaitu pengendalian
- 2). Sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja
- 3). Untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan
- 4). Membantu penentuan langkah-langkah yang berkaitan dengan kegiatan proyek selanjutnya.
- 5). Sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya.

b. Bagi pihak Pengelola Proyek, yaitu:

- 1). Membantu untuk mempersiapkan laporan dalam waktu yang singkat
- 2). Mengetahui kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan menjaga kinerja yang sudah baik.
- 3). Sebagai dasar (informasi) yang penting untuk melakukan evaluasi proyek.

5. Tipe-tipe/Macam-macam Monitoring

Ada tiga tipe dasar pengawasan atau monitoring dalam perencanaan pendidikan, yaitu; a). pengawasan pendahuluan, b). pengawasan “concurrent”, dan c). pengawasan umpan balik (*feed back*) seperti ditunjukkan gambar 1.



Gambar 1. Tipe-tipe pengawasan atau monitoring (Hani Handoko, *Manajemen*, 1995 : 363).

Pertama, pengawasan pendahuluan (*feedforward*). Pengawasan/monitoring pendahuluan, atau dalam istilah lain disebut *steering controls/monitors*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi (Hani Handoko, *Manajemen*, 1995 : 363). Kegiatan monitoring ini akan efektif hanya bila pemonitor mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan.

Kedua, pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control/monitor*). Pengawasan ini, sering disebut pengawasan “ya-tidak”, “*screening control*” atau “*berhenti-terus*”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan (Hani Handoko, *Manajemen*, 1995: 363).

Ketiga, pengawasan umpan balik (*feedback control*). Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai *past-action controls/monitors*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan ditrapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat *historical*, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi/terlaksana (Hani Handoko, *Manajemen*, 1995 : 362) Menurut hemat penulis, pengawasan model seperti ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi.

6. Karakteristik Pengawasan (*monitoring*) yang Efektif

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya a). mengawasi kegiatan yang benar; b). tepat waktu; c). dengan biaya yang efektif; d). tepat-akurat dan e). dapat diterima oleh yang bersangkutan (Hani Handoko, *Manajemen*, 1995 : 363). Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut maka, semakin efektif sistem pengawasannya. Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut:

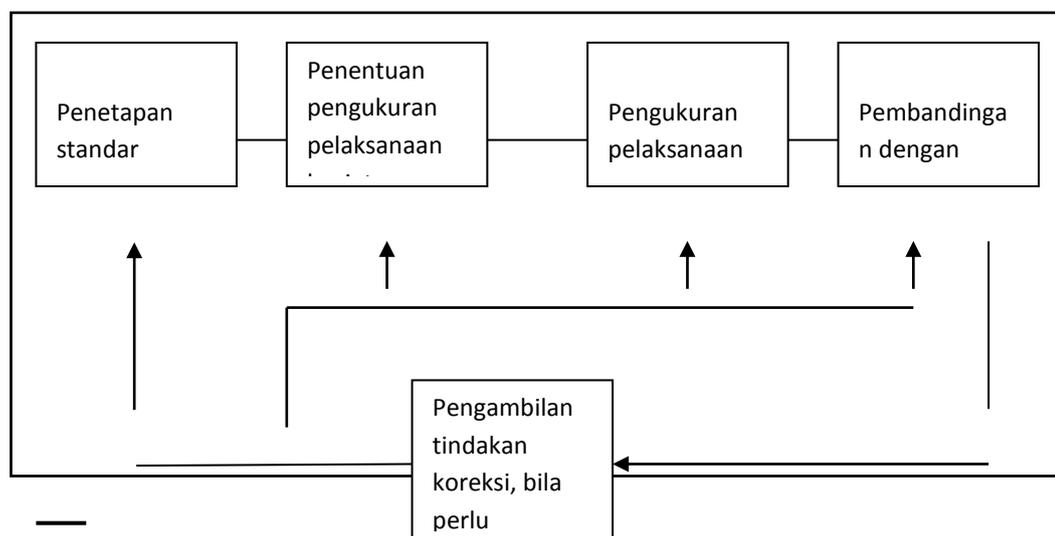
- a. Akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada (Hani Handoko, *Manajemen*, 1995 : 363).

- b. Tepat-waktu, informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
- c. Obyektif dan menyeluruh, informasi harus sudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap (Hani Handoko, *Manajemen*, 1995 : 363).
- d. Terpusat pada titik pengawasan strategik, sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
- e. Realistik secara ekonomi, biaya pelaksanaan sistem *monitoring* harus murah
- f. Realistik secara organisasional, sistem *monitoring* harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi
- g. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena: (1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya keseluruhan operasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
- h. Fleksibel, pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
- i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, sistem *monitoring* efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang harus diambil.

j. Diterima para anggota organisasi, sistem *monitoring* harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi (Hani Handoko, *Manajemen*, 1995 : 363).

7. Tahapan Proses Monitoring

Proses pengawasan (*monitoring*) biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah) seperti ditunjukkan gambar 2. tahap-tahapnya adalah; a). penetapan standar pelaksanaan (perencanaan); b) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; c). pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata; d). perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; dan e). pengambilan tindakan koreksi bila perlu (Hani Handoko, *Manajemen*, 1995 : 363).



Gambar 2. (Hani Handoko, *Manajemen*, 1995: 363)

B. Evaluating dalam Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

1. Pengertian evaluating sarana dan prasarana sekolah

Mengingat pentingnya *evaluating* dalam berbagai kelompok atau suatu organisasi, maka Islam sebagai suatu agama yang komprehensif memberikan pedoman-pedoman yang dijadikan sebagai suatu prinsip dalam evaluasi. Allah SWT, berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. (الصف : 2-3)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Amat besarlah kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." (QS. AS-Shof: 2-3)

Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا، زَيِّنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا. (الحديث)

Artinya : "Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat atas kerja orang lain."

Istilah evaluasi (*evaluating*) berasal dari bahasa Inggris yaitu "evaluation". Dalam buku *Essential of Educational Evaluation* karangan Edwin Wand dan Gerald W. Brown dikatakan bahwa; *evaluation refer to the act or process to determining the value of something* (Edwin Wand and Gerald W. Brown, *Essentials of Educational Evaluation*. 1957 : 01). Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu.

Stufflebeam mendefinisikan evaluasi sebagai berikut: "*Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*" Artinya: Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan (D. L. Stufflebeam *Educational Evaluation and The Decision Making*, 1972 : 05).

World Health Organization (WHO) merumuskan evaluasi sebagai suatu proses dari pengumpulan dan analisis informasi mengenai efektivitas dan dampak suatu program dalam tahap tertentu sebagai bagian atau keseluruhan dan juga mengkaji pencapaian program. Definisi lain dikemukakan oleh Swansburg (1996) yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja adalah suatu proses pengendalian dimana kinerja pegawai dievaluasi berdasarkan standar (WHO," *Design and Implementation of health Information System*" , 2000)

Evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data, analisis informasi tentang efektivitas dan dampak dari suatu tahap atau keseluruhan program. Evaluasi juga termasuk menilai pencapaian program dan mendeteksi serta menyelesaikan masalah dan merencanakan kegiatan yang akan datang. Evaluasi adalah proses pemberian informasi (*feedback*) untuk membantu membuat keputusan tentang objek yang akan dievaluasi (John M. Owen, *Program Evaluation, Form and Approaches*, 1993).

Pengertian evaluasi menurut *Joint Committee* (1981) ialah penelitian yang sistematis atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa obyek (Lindeman, M. Program Evaluation, [online]. Available, from: www.tedi.uq.edu.au/conferences/A_conf/papers/Isaacs.html (Accessed 3 July 2007). Purwanto dan Atwi Suparman, 1999 mendefinisikan evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang suatu program. Rutman and Mowbray 1983 mendefinisikan evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan *outcomes* suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan.

Chelimsky (1989) mendefinisikan evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektifitas suatu program. Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektifitas suatu program (Silver, H. Evaluation Research in Education, Available, 2004. from: outh.ac.uk/resined/evaluation/index.htm [Accessed 3 July 2007]).

Kegiatan evaluasi menurut Nanang Fattah adalah pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut TR. Marrison, sebagaimana telah dikutip oleh Nanang Fattah, ada tiga faktor penting dalam konsep evaluasi yaitu pertimbangan (*Judgement*), deskripsi obyek penilaian, dan kriteria yang bertanggungjawab (*Defensible Criteria*). Pada umumnya

kegiatan evaluasi dilakukan untuk menelaah faktor-faktor penghambat serta pendukung suatu program (Onong Uchjana Effendy, *Hubungan Masyarakat; Suatu Studi Komunikasi*. 2000 : 103). Begitu juga dalam kegiatan *public relation*. Evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengetahui apakah program benar-benar dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan seperti yang dikehendaki (Soenarko Setyodarmodjo, *Public Relations; Pengertian, Fungsi dan Peranannya*. 2003 : 118).

Pada umumnya kegiatan evaluasi dilakukan untuk menelaah faktor-faktor penghambat serta pendukung suatu program (Onong Uchjana Effendy, hlm: 103). Begitu juga dalam kegiatan perencanaan pendidikan maupun proyek pendidikan. Evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengetahui apakah program benar-benar dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan seperti yang dikehendaki (Soenarko Setyodarmodjo, Op. cit, hlm: 118). Sementara hasil dari evaluasi tersebut kemudian berfungsi sebagai umpan balik (*Feedback*) yang sangat penting artinya bagi pengambil kebijakan selanjutnya. Selanjutnya dapat didefinisikan bahwa *evaluating* manajemen sarana dan prasarana adalah suatu penelitian yang sistematis atau yang teratur tentang manfaat atau guna untuk menilai rancangan, implementasi dan efektifitas proses kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan.

2. Dasar-dasar Evaluasi

Sesuai dengan pengertian evaluasi diatas, maka dalam pelaksanaannya, evaluasi harus mempunyai dasar yang kuat dan tujuan yang jelas. Dasar yang dimaksud adalah prinsip ilmiah yang melandasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi yang mencakup konsep-konsep berikut ini:

- a. *Filsafat*; yaitu masalah-masalah yang merupakan dasar dalam pendekatan sistem dalam evaluasi adalah: apakah evaluasi itu?; mengapa evaluasi perlu diberikan?; dan bagaimana cara memberikannya? (Slameto, *Evaluasi Pendidikan*, 1988 : 8-9)
- b. *Komunikasi*; yaitu evaluasi dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung terhadap variabel yang di evaluasi.
- c. *Manajemen*; yaitu evaluasi perlu diorganisasikan pelaksanaannya, apakah secara individual atau kelompok dan bagaimana pengelolaannya.
- d. *Sosiologi–anthropologi*; yaitu evaluasi harus sesuai dan berguna dalam masyarakat/kebudayaan, untuk mencapai suatu kemajuan.
- e. *Evaluasi (measurement)*; yaitu evaluasi yang menggunakan prosedur, jenis dan diambil keputusan yang bertanggung jawab (Slameto, *Evaluasi Pendidikan*, 1988 : 8-9)

3. Prinsip-prinsip Evaluasi

Adapun prinsip-prinsip dari pada evaluasi itu terdiri dari:

- a. Prinsip berkesinambungan, artinya evaluasi dilakukan secara berkesinambungan
- b. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dalam program (komponen) dievaluasi.
- c. Prinsip obyektif, artinya evaluasi mempunyai tingkat kebebasan dan subyektivitas atau bias pribadi evaluator.
- d. Prinsip keterandalan dan Sahih, yaitu kriteria internal dan eksternal untuk evaluasi program, biasanya dipergunakan kriteria standar patokan (mutlak) dan *criteria* norma (standar relatif).
- e. Prinsip kegunaan, artinya evaluasi yang dilakukan hendaknya sesuatu yang bermanfaat, baik untuk kepentingan pimpinan maupun bawahan (Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*. 2004 : 114).

4. Elemen Penilaian sarana dan Prasarana

Perlu penulis kodifikasi beberapa elemen penting penilaian terhadap sarana dan prasarana lembaga pendidikan, dimana hal ini diadopsi dari sarana dan prasarana sebuah perguruan tinggi, namun tidak ada problem, hal ini digunakan pada berbagai lembaga pendidikan secara universal pada konteks sarana dan prasarannya, yang diantaranya adalah:

- a. Sekolah memiliki sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi, mencakup sistem inventarisasi yang lengkap. Sistem pengelolaan tersebut

mencakup pula pola pelaporan secara berkala dari unit pelaksana kepada pihak manajemen serta dapat dipergunakan sebagai informasi bagi para pengguna (siswa dan guru).

- b. Sekolah memiliki kebijakan, pedoman, panduan, dan peraturan yang jelas tentang keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana di tingkat institusi. Bukti pelaksanaan dari kebijakan tersebut harus dapat dilacak dari peraturan yang lebih rinci dan aplikatif serta laporan berkala di tingkat laboratorium/studio/perpustakaan dan tempat-tempat lain di mana kegiatan dilaksanakan.
- c. Sekolah mempunyai dokumen kepemilikan, hibah, sewa, atau pinjam melalui kesepakatan atau perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara perguruan tinggi dan pihak terkait
(<http://www.akreditasi.unair.ac.id/folderfile/standar%205.doc>.)

5. Matriks Penilaian Portofolio Akreditasi Institusi Standar Sarana

dan Prasarana (Kumpulan Instrumen Standar 5 Akreditasi Institusi

Perguruan Tinggi Departemen pendidikan sional Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi Jakarta 2007,

<http://www.akreditasi.unair.ac.id/folderfile/standar%205.doc>.)

KOMPONEN/ PARAMETER	HARKAT DAN PERINGKAT			
	SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
	4	3	2	1
5.1 Perguruan	Ada sistem	Ada sistem	Ada sistem	Tidak ada sistem

tinggi memiliki sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi, mencakup sistem inventarisasi yang lengkap. Sistem pengelolaan tersebut mencakup pula pola pelaporan secara berkala dari unit pelaksana kepada pihak manajemen serta dapat dipergunakan	pengelolaan sarana dan prasarana yang terdokumentasi mengenai: perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemutakhiran, penghapusan <i>resource sharing</i> dengan sistem pelaporan	pengelolaan sarana dan prasarana yang terdokumentasi mengenai: perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemutakhiran, penghapusan <i>resource sharing</i> tetapi tidak ada sistem pelaporan	pengelolaan sarana dan prasarana yang terdokumentasi tetapi tidak lengkap mencakup semua aspek mengenai: perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemutakhiran, penghapusan	pengelolaan sarana dan prasarana yang terdokumentasi
---	--	--	--	--

sebagai informasi bagi para pengguna (mahasiswa dan dosen).	secara berkala yang memanfaatkan teknologi informasi atau secara manual.	secara berkala.	resource sharing dan tidak ada sistem pelaporan secara berkala	
5.2 Perguruan tinggi memiliki kebijakan, pedoman, panduan, dan peraturan yang jelas tentang keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana di tingkat institusi. Bukti pelaksanaan	Ada dokumen tertulis mengenai: kebijakan, peraturan, pedoman atau buku panduan yang jelas berkaitan dengan keamanan	Ada dokumen tertulis mengenai: kebijakan, peraturan, pedoman atau buku panduan yang jelas berkaitan dengan keamanan	Ada dokumen tertulis, tetapi tidak lengkap mengenai: kebijakan, peraturan, pedoman atau buku panduan yang berkaitan	Tidak ada dokumen tertulis mengenai: kebijakan, peraturan, pedoman atau buku panduan.

dari kebijakan tersebut harus dapat dilacak dari peraturan yang lebih rinci dan aplikatif serta laporan berkala di tingkat laboratorium/studio/perpustakaan dan tempat-tempat lain di mana kegiatan dilaksanakan.	dan keselamatan pengguna sarana dan prasarana serta tersosialisasi dengan baik	dan keselamatan pengguna sarana dan prasarana, tetapi tidak tersosialisasi dengan baik	dengan keamanan dan keselamatan pengguna sarana dan prasarana	
5.3 Perguruan tinggi mempunyai dokumen kepemilikan, hibah, sewa, atau pinjam melalui kesepakatan atau perjanjian sesuai dengan ketentuan	80% - 100% sarana dan prasarana dimiliki institusi/negara/yayasan, yang	60% - 79% sarana dan prasarana dimiliki institusi/negara/yayasan, yang dibuktikan	40% - 59% sarana dan prasarana dimiliki institusi/negara/yayasan, yang dibuktikan	<40% sarana dan prasarana dimiliki institusi/negara/yayasan, yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, di mana sisanya dibuktikan

hukum yang berlaku antara perguruan tinggi dan pihak terkait.	dibuktikan dengan dokumen yang sah, di mana sisanya dibuktikan dengan dokumen perjanjian sewa/pinjam yang sah	dengan dokumen yang sah, di mana sisanya dibuktikan dengan dokumen perjanjian sewa/pinjam yang sah	dengan dokumen yang sah, di mana sisanya dibuktikan dengan dokumen perjanjian sewa/pinjam yang sah.	dengan dokumen perjanjian sewa/pinjam yang sah.
---	---	--	---	---

C. Telaah Kritis terhadap Monitoring dan Evaluasi Sarana dan

Prasarana

1. Monev terhadap Keberadaan Sarana dan Prasarana

Keberadaan Monev (Monitoring dan evaluasi) dalam sebuah pelaksanaan program memiliki arti yang sangat signifikan, dalam konteks manajemen sarana dan prasarana pemantauan dan penilaian harus benar-benar dilakukan. Kecenderungan yang terjadi dilembaga pendidikan saat ini adalah Monev yang tidak dilakukan, lembaga-lembaga pendidikan cenderung lebih mudah melakukan proses pengadaan sarana dan prasarana, namun dalam proses Monev hal tersebut sedikit dilakukan atau

bahkan sama sekali tidak dilakukan. Tidak peduli lembaga pendidikan tersebut adalah lembaga pendidikan Islam atau lembaga pendidikan umum, yang jelas didalamnya proses Monev kurang dilakukan. Barangkali lembaga menganggap bahwa hal itu tidak penting atau barangkali lembaga tertinggi tersebut seperti Dinas pendidikan atau Depag juga tidak pernah melakukan Monev terhadap lembaga-lembaga pendidikan dibawah naungannya, seolah kedua lembaga tersebut merasa sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi ketika dana tersebut sudah dicairkan kepada lembaga-lembaga pendidikan dibawah naungannya. Ini merupakan sebuah bukti bahwa betapa perhatian pemerintah sendiri dalam membangun dan mengembangkan pendidikan masih ada dimensi-dimensi yang lemah yang sampai saat ini hal tersebut belum mengalami perubahan signifikan. Mudah memang melakukan belanja dan belanja karena pemerintah sendiri punya anggaran pendidikan yang di ambil dari rakyat. Namun apakah kemudian proses Monev dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan pendidikan?. Oleh karena itu jangan salahkan lembaga pendidikan dibawah naungan Dinas maupun Depag apabila mereka tidak melakukan Monev terhadap barang-barang hasil bantuan maupun hibah, sebab selama ini Monev oleh Dinas pendidikan dan Depag juga tidak pernah di minta pertanggung jawabannya. Maka disinilah sebenarnya titik rawan korupsi atau penyelewengan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan kecil yang nakal (Baca; *sekolah/Madrasah*).

Kondisi tersebut akan lebih parah terjadi di lembaga pendidikan yang sifatnya swasta, dimana bantuan-bantuan yang diperoleh lebih banyak didapat dari masyarakat umum, yang mana untuk urusan Monev sama sekali tidak dilaksanakan. Bahkan untuk beberapa lembaga pendidikan sama sekali tidak melakukan proses pelaporan.

Melihat kenyataan ini proses Monev memang tidak saja dilakukan oleh lembaga yang lebih tinggi dalam hal ini Dinas pendidikan maupun Depag, namun sekolah juga harus memiliki program monev dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan sarana dan prasarana yang ada.

2. Monev terhadap Penggunaan Sarana dan Prasarana

Selain dari pada paparan tersebut di atas, dampak dari pada lemahnya atau bahkan tidak adanya proses Monev, cenderung berakibat pada adanya penyelewengan dan penyalahgunaan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan. Salah satu contohnya adalah kita melihat banyaknya pejabat dari sebuah lembaga pendidikan baik tingkat sekolah sampai dengan Perguruan Tinggi dengan enaknyanya menggunakan fasilitas-fasilitas milik lembaga untuk kepentingan pribadi atau keluarga tanpa adanya rasa bersalah dan malu, baik fasilitas berupa mobil, sepeda motor, laptop serta fasilitas-fasilitas lainnya. Itu semua terjadi juga akibat dari lemahnya dan tidak adanya proses monev yang baik, baik di kalangan tingkat tinggi seperti Dinas pendidikan dan Depag maupun tingkat rendah sekalipun seperti lembaga-lembaga pendidikan. Sewajarnya proses monev yang seringkali dianggap remeh ini harus menjadi prioritas utama

dalam manajemen sarana dan prasarana suatu lembaga pendidikan guna mendukung dan mewujudkan kualitas pendidikan secara umum dan kualitas sarana dan prasarana itu sendiri.

3. Kurangnya Perhatian terhadap Kondisi Barang

Dalam beberapa lembaga pendidikan terdapat kecenderungan bahwa adanya lempar tanggung jawab terhadap kondisi barang yang sudah memprihatinkan penggunaannya, sehingga kondisi barang tersebut di biarkan begitu saja, Wakasek maupun Wakamad sarana prasarana juga kurang cerdas dan inovatif dalam menghadapi kenyataan seperti tersebut. Jelas bahwa Monev memiliki arti yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kepala sekolah perlu segera mengambil tindakan yang tegas dan jelas jika terdapat kenyataan bahwa barang yang terdapat di lembaga pendidikan sudah tidak layak pakai, barangkali rusak atau karena berbagai kondisi yang tidak memungkinkan, sangat sia-sia apabila barang tersebut dibiarkan begitu saja digudang atau tempat penyimpanan. Yang lebih penting lagi, selain Wakasek atau wakamad sarana prasarana yang sudah jelas memiliki tanggung jawab di bidang sarana dan prasarana, maka perlu juga membentuk organisasi kecil untuk membantu kinerja wakasek atau wakamad sarana dan prasarana, agar tugas mengurus banyak dan jenisnya barang di lembaga pendidikan benar-benar mampu dilakukan.

4. Perlu Adanya Tindak Lanjut terhadap Hasil Monev

Monev yang baik adalah proses Monev yang menghasilkan data-data penting mengenai perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan sarana prasarana dilembaga pendidikan. Data-data mengenai kondisi obyektif tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan terhadap kondisi barang itu sendiri. Di beberapa lembaga pendidikan Monev memang dilakukan, namun setelah dihasilkan data mengenai kondisi sarana dan prasarana, selanjutnya tidak ada tindakan serta langkah-langkah yang dilakukan, padahal sudah jelas apa yang sesungguhnya harus dilakukan terkait dengan kondisi yang terjadi.

KESIMPULAN

Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan analisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana, sehingga masalah yang dilihat/ditemui dapat diatasi. Selanjutnya monitoring manajemen sarana dan prasarana adalah suatu proses pengumpulan dan analisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi terhadap proses kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan.

Menurut keputusan Menteri P dan K no. 079/1975, sarana pendidikan terdiri atas 3 kelompok besar Pertama Bangunan dan perabot sekolah. Kedua Alat pelajaran yang terdiri atas pembukuan dan alat-alat peraga dan laboratorium. Ketiga Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Sedangkan tujuan monitoring dalam suatu proyek atau pelaksanaan suatu program adalah Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana, Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi, Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek, Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan.

Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

Sedangkan Ruang Lingkup Monitoring Sarana dan Prasarana meliputi; Ruang kuliah, Ruang dosen, Ruang seminar, Laboratorium, Perpustakaan, fasilitas komputasi, Fasilitas teknologi informasi, Perlengkapan pendukung pembelajaran, Perlengkapan pendukung kegiatan kemahasiswaan, dan Peralatan laboratorium.

Kemudian terdapat tiga tipe dasar pengawasan atau monitoring dalam perencanaan pendidikan, yaitu; a). pengawasan pendahuluan, b). pengawasan “*concurrent*”, dan c). pengawasan umpan balik (*feed back*).

Sedangkan Evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data, analisis informasi tentang efektifitas dan dampak dari suatu tahap atau keseluruhan program. Selanjutnya evaluating manajemen sarana dan prasarana adalah suatu penelitian yang sistematis atau yang teratur tentang manfaat atau guna untuk menilai rancangan, implementasi dan efektifitas proses kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan.

Dasar-Dasar Evaluasi meliputi Filsafat, Komunikas, Manajemen, Sosiologi–anthropologi, Evaluasi (*measurement*). Sedangkan Prinsip-prinsip Evaluasi meliputi Prinsip berkesinambungan, Prinsip menyeluruh, Prinsip obyektif, Prinsip keterandalan dan Sahih,dan Prinsip kegunaan.

SARAN

Ada beberapa saran yang perlu kami sampaikan dalam bentuk polemik pada makalah singkat ini terhadap efektifitas dan efisiensi monev manajemen sarana dan prasarana di masa yang akan datang yang cenderung mengalami berbagai paradigma sesuai kebutuhan pendidikan, yang diantaranya adalah:

1. Secara universal kelemahan sarana dan prasarana lembaga pendidikan tidak hanya dari aspek pendanaan namun juga perencanaan pembangunan gedung yang efektif dan efisien, tepat guna dan tidak mengundang pemborosan.

2. Seharusnya proses pengadaan barang diikuti dengan adanya monev yang berkesinambungan.

3. Penggunaan fasilitas oleh pejabat atau guru pada suatu lembaga pendidikan hendaknya memperhatikan petunjuk dan aturan pakai, tepat guna dan disertai dengan proses monev yang ketat agar hal tersebut mampu memperkecil adanya penyelewengan dan penyalahgunaan fasilitas yang ada.

4. Sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai seharusnya cepat mendapatkan tindak lanjut, akan dikemanakan barang tersebut agar keberadaannya tidak sia-sia dan memakan tempat yang lebih diperlukan bagi program pendidikan lainnya.

5. Lemahnya monev di suatu lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah, cenderung bermula dari lemahnya dan

tidak adanya monev dari pihak atasan seperti Dinas pendidikan dan Depag yang telah memberikan bantuan baik berupa sarana maupun prasarana.

6. Dalam rangka melaksanakan monev yang efektif dan efisien perlu adanya pedoman umum maupun pedoman yang ada di lembaga pendidikan itu sendiri sebagai petunjuk pelaksanaan monev yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	Anonymous. 1981. <i>Webster's New Collegiate Dictionary</i> , Massachusset: G & C Merriam Co., Springfield.
[2]	Anonymous. 1988. <i>Webster's New Word Collegiate Dictionary</i> , London: Third College Edition, Simon and Schuster Inc.
[3]	Daryanto. 2001. <i>Administrasi pendidikan</i> , cetakan II, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
[4]	Depdiknas, <i>Kumpulan Instrumen Standar 5 Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi</i> Jakarta 2007. http://www.akreditasi.unair.ac.id/folderfile/standar%205.doc .
[5]	Effendy, Uchjana, Onong. 2000. <i>Hubungan Masyarakat</i> , Suatu Studi Komunikasi, Cet. Keenam, Bandung: Remaja Rosdakarya.
[6]	Fattah, Nanang. 2004 <i>Landasan Manajemen Pendidikan</i> . Cet. Ketujuh, Bandung: Remaja Rosdakarya.
[7]	Hamalik, Oemar. 1994. <i>Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (Standar dan Pelaksanaan di Perguruan Tinggi)</i> , Bandung : Trigenda Karya.
[8]	Handoko, Hani. 1995. <i>Manajemen</i> , Yogyakarta: BPFU UGM
[9]	http://www.javascript.History.back/ .
[10]	http://ditptksd/go.id/index.php?name=news&file=aarticle&sid=10 .
[11]	http://www.biro.perencanaan Departemen Sosial RI (Rabu, 14 November 2007).
[12]	KepMen Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang

	pedoman pengawasan-pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana, pascasarjana di Perguruan Tinggi (http://www.dikti.org/).
[13]	Lindeman. Program Evaluation, [Internet]. Available, from: www.tedi.uq.edu.au/conferences/A_conf/papers/Isaacs.html (Accessed 3 July 2007).
[14]	Mockler, Robert J. 1972. <i>The Management Control Process</i> , Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
[15]	Owen, John M. 1993. <i>Program Evaluation, Form and Approaches</i> , Australia: National Library.
[16]	Partanto, Pius & Al-Barry, M. Dahlan. 1994. <i>Kamus Ilmiah Populer</i> , Surabaya: Arkola.
[17]	Setyodarmodjo, Soenarko. 2003. <i>Public Relations; Pengertian, Fungsi dan Peranannya</i> , Cet. Kedua, Surabaya; Papyrus.
[18]	Silver. 2004. <i>Evaluation Research in Education</i> , Available. from: outh.ac.uk/resined/evaluation/index.htm [Accessed 3 July 2007].
[19]	Slameto. 1988. <i>Evaluasi Pendidikan</i> , Jakarta: PT. Bina Aksara.
[20]	Soekartawi. 1995. <i>Monitoring Dan Evaluasi</i> , Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
[21]	Stufflebeam, D.L. 1972. <i>Educational Evaluation and The Decision Making</i> , (Illionis: F.E Peacock Publisher Inc. Itasta)
[22]	Suryadi, Ace. & Tilaar, H.A.R. 1994. <i>Analisis Kebijakan Pendidikan (suatu pengantar)</i> , cet. II, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
[23]	Tafsir, Ahmad. 2000. <i>Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam</i> , cetakan III, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
[24]	Wand, Edwin. & Brown, Gerald W. 1957. <i>Essentials of Educational Evaluation</i> , New York: Holt Renehart and Winston.
[25]	WHO (World Health Organization). 2000. "Design and Implementation of health Information System" Genewa.